

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN  
ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN RIAU**

oleh:  
**ADJI SURADJI MUHAMMAD**  
**NIM. 20132020004**

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN  
ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN RIAU**

**Oleh:  
ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM 20132020004**

**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adji Suradji Muhammad

NIM : 20132020004

Program : S3 (Doktor)

Menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Saya yang menvatakan,



Adji Suradji Muhammad

**DISERTASI**  
**LEMBAR PENGESAHAN**  
**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN**  
**KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA**  
**DI KEPULAUAN RIAU**

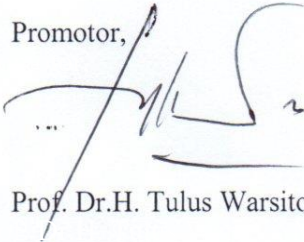
**Diajukan oleh:**

ADJI SURADJI MUHAMMAD

NIM : 20132020004

Telah Disahkan oleh:

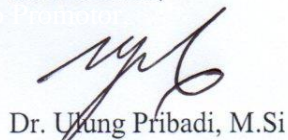
Promotor,



Prof. Dr.H. Tulus Warsito, M.Si

Tanggal, 9/10 2017

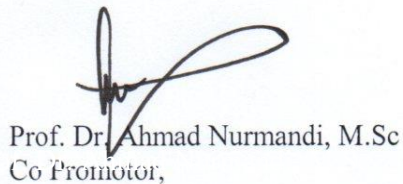
Co Promotor,



Dr. Ulung Pribadi, M.Si

Tanggal, 9/10 2017

Co Promotor,



Prof. Dr. Ahmad Nurmandi, M.Sc

Co Promotor,

Tanggal, 3/10 2017



## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN  
RIAU”**

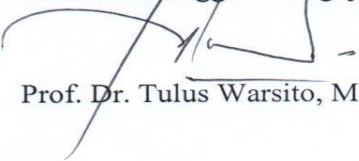
Ditulis oleh :

Nama : ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM : 20132020004  
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 03 April 2017, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Politik Islam-Ilmu Politik.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, <sup>9/10</sup>.....2017  
Promotor/Anggota Penguji,



Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.



## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan,  
dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN  
RIAU”**

Ditulis oleh :

Nama : ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM : 20132020004  
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup)  
pada tanggal 03 April 2017, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut  
sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka  
Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam  
Politik Islam-Ilmu Politik.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, ... 9/10 ..... 2017  
Promotor II/Anggota Penguji,

  
Dr. Ulung Pribadi, M.Si.

## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan,  
dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN  
RIAU”**

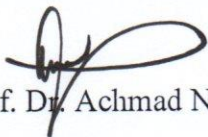
Ditulis oleh :

Nama : ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM : 20132020004  
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup)  
pada tanggal 03 April 2017, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut  
sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka  
Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam  
Politik Islam-Ilmu Politik.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, .....<sup>3/10</sup>.....2017  
Promotor III/Anggota Penguji,

  
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.



## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN  
RIAU”**

Ditulis oleh :

Nama : ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM : 20132020004  
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 03 April 2017, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Politik Islam-Ilmu Politik.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, ...12/10/...2017  
Anggota Penguji,



Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan,  
dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KEPULAUAN  
RIAU”**

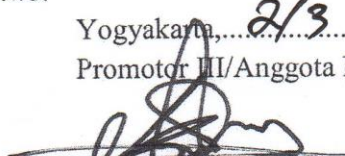
Ditulis oleh :

Nama : ADJI SURADJI MUHAMMAD  
NIM : 20132020004  
Jenjang : S3 (Doktor)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup)  
pada tanggal 03 April 2017, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut  
sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka  
Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam  
Politik Islam-Ilmu Politik.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, ..... 2/3 ..... 2018  
Promotor III/Anggota Penguji,

  
Eko Priyo Purnomo, M.Res, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Setinggi puja dan sedalam syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan dengan ucapan *alhamdulillah hirobbil alamin* karena telah diberikan kesehatan dan sekaligus kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas berat ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Doktor di kampus kebanggaan ini (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Semoga dengan bersyukur maka nikmat-nikmat Allah SWT akan terus menghampiri. Shalawat teriring salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarganya dengan senantiasa mengaharap syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun secara materiil sehingga disertasi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program doktoral ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Prof. Tulus Warsito baik kapasitas beliau sebagai Promotor maupun sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik-Politik Islam Pasca UMY. Berkat dorongan serta dukungan beliau maka disertasi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya kepada Dr.Ulung Pribadi yang sekaligus sebagai Co-Promotor dan Sekertris Program Studi yang tidak jemu-jemunya memberikan bimbingan, nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan tugas berat selama dalam menempuh pendidikan setingkat Doktor.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Achmad Nurmandi, M.Si yang sekaligus selaku Direktur Pasca Sarjana UMY yang telah sudi “meluruskan” penulis dalam menyusun desain penelitian disertasi ini. Penulis menyadari bahwa desain penelitian sebelum ini masih “terasa” bias dan kurang fokus sehingga penulis merasa berbelok dan sekali lagi kurang fokus. Berkat saran dan masukan beliau maka disertasi ini bisa mengarah kepada yang penulis cari selama ini. Begitu juga halnya ucapan yang sama saya haturkan kepada Dr.Surwandono, Dr.Hase dan Dr.Mega, terimakasih atas saran, masukan dan terutama atas *support*-nya kepada penulis untuk segera

menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Kumorotomo dan Dr. Eko atas bimbingannya yang sangat membantu dalam proses penyusunan Disertasi ini. Melalui tanpa ada tambahan “energi” dari beliau-beliau ini mungkin penulis sudah kelelahan dan akhirnya pasrah pada kondisi yang dihadapi. Kepada Mas Wasono, Bu Menik, Mbak Wiedy, Mbak Yuni terimakasih atas bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan maupun bantuan lainnya yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu.

Tidak ketinggalan penulis juga sampaikan ucapan terimakasih kepada Eka Suswaini, ST,MT, istri sekaligus teman diskusi, teman bercanda yang telah dengan sabar “tercuri” waktu dan perhatiannya selama penulis menyelesaikan program doktor ini pertanyaan “yah kapan selesai” terasa menjadi cambuk yang terus memicu dan memacu penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada anak-anakku Muhammad Naafi’ Ramdhani yang telah kehilangan banyak waktu bermain bersama ayah, serta kepada Muhammad Azzam Disertasianov yang telah memberikan “spirit baru” buat ayah dalam menyelesaikan disertasi, ayah ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Kepada ibundaku, ibu Semi terimakasih telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga apa yang ibunda lakukan kepada ananda diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT karena ananda sadar bahwa ananda tidak mungkin bisa memberikan kebahagiaan yang cukup. Kepada ayahnda Wagi (alm) semoga dengan jerih payah, peluh keringat yang ayahnda lakukan selama hidup untuk memberikan nafkah bagi ananda mendapat balasan yang berlipat dan menjadi pendamping selama berada dalam alam kubur. Kepada bapak-ibu mertua, Ibu Sri Supeni Wulandari dan Bapak Suparman, terimakasih penulis haturkan berkat doa-doa tulus serta kesabaran yang bapak-ibu berikan maka disertasi ini dapat penulis selesaikan. Buat Mas Sugeng, Mas Amin, Mbak Sumini, Mbak Suparti, Dharu serta Tika, Penulis yakin dan bahkan *haqul yaqin* bahwa tanpa do’a tulus dan ikhlas dari kalian semua maka tugas akhir ini tidak dapat penulis selesaikan dengan baik. Permohonan maaf juga penulis sampaikan karena selama mengambil program Doktor ini penulis sering merepotkan dan menyita waktunya.

Penulis “akhirya” lebih menyadari bahwa pendidikan dengan strata tiga (S3) sungguh luar biasa berat. Apalagi dengan status “ijin belajar” terasa semakin berat karena disamping dituntut harus sukses dalam kuliah, penulis juga harus mampu memenuhi kewajiban lainnya ditempat kerja. Bahkan godaan silih berganti yang semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan akan kuliah, keluarga dan pekerjaan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan Hibah Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2016 melalui kontrak Nomor 001/UN53.01.1/KONTRAK-LP/I/2016 tertanggal 2 Mei 2016. Dengan bantuan ini maka Penulis bertambah “semangat” untuk segera menyelesaikan penelitian yang sungguh menyita waktu, tenaga dan pikiran serta biaya.

Akhirnya melalui kesempatan ini penulis tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala curahan rahmat dan nikmat selama menjalankan berbagai kewajiban. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan disertasi ini baik langsung maupun tidak langsung dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga ucapan terimakasih ini tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis ungkapkan dalam kesempatan kali ini. “Tiada gading yang tak retak”, pepatah kuno ini pada prinsipnya masih berlaku hingga saat ini, khususnya pada diri penulis, sehingga kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk melengkapi segala hal yang kurang dan belum lengkap karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Yang Maha Sempurna.

Tanjungpinang, 2018  
Tertanda,

Adji Suradji Muhammad



## ABSTRAK

Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Kamboja, Republik Palau, Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Untuk alasan menjaga kedaulatan, Indonesia membentuk lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan sekaligus mengelola kawasan perbatasan. Melalui Perpres Nomor 12 tahun 2010 dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang beranggotakan 16 Menteri dan 3 Kementerian Koordinator. Disamping itu melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2011, pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah daerah yang memiliki daerah perbatasan untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan. Kepulauan Riau sebagai daerah yang berbatasan dengan 4 (empat) negara yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja telah membentuk Badan Pengelola Perbatasan 4 Kabupaten (Bintan, Karimun, Natuna dan Anambas) dan 1 Kota yaitu Batam. Disamping itu masih ada beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang terkait dengan perbatasan antara lain TNI, POLRI dan BAKAMLA. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola perbatasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Seharusnya dengan pendekatan kolaborasi antar lembaga tadi dapat mengoptimalkan pengelolaan kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau ditemukan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum berjalan optimal sehingga kolaborasi yang ada termasuk kategori “kolaborasi tertier” yang ditandai dengan adanya sikap-sikap oportunistis dari masing-masing pihak yang memiliki fungsi dalam mengelola perbatasan. Agar kolaborasi lebih optimal maka diperlukan tahap sinkronisasi dalam hal perencanaan diantara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan antar negara.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kawasan Perbatasan.

## ABSTRACT

*Indonesia has border with 10 countries, namely Singapore, Malaysia, Philippines, India, Vietnam, Thailand, Cambodia, Republic of Palau, Papua New Guinea (PNG) and Australia. For reasons of maintaining sovereignty, Indonesia established the agencies that have duty and function of maintaining and manage the border area. Under Pepres No. 12 of 2010 established the National Agency for Border Management consisting of 16 Ministers and 3 Ministry Coordinator. Besides, through Regulation No. 2 of 2011, the government mandated local governments that have border area to form the Border Management Agency. Riau Islands as areas that border with four (4) countries, namely Malaysia, Singapore, Vietnam and Cambodia have formed a Border Management Agency 4 District (Bintan, Karimun, Natuna and Anambas) and 1 city of Batam. Besides, there are still some institutions that have functions and authority associated with border such as TNI, Police and BAKAMLA. However, the more agencies have authorities to manage the borders areas are not in line with their performance. In fact, they do not run optimally. Moreover, they are failed to perform a compatible inter-agency collaboration approach to optimize the border area management. In the Kepulauan Riau Province, our research found that the collaboration of several institutions related to border area management was defined as a "tertiary collaboration". It was indicated by the presence of opportunist attitudes of each party who had authority to manage the border. Adapting this situation, we suggest preparing a synchronization phase in the plan of harmonizing border area management institutions in order to obtain an optimum collaboration result.*

*Key Words: Collaborative Governance, Border Area.*

## تلخيص البحث

للدولة الإندونيسية حدود مع عشر دول، وهي: سنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وهند، وفيتنام، وتايلاند، وكمبوديا، وجمهورية بالاو، وبابوا غينيا الجديدة (Papua New Guinea) وأستراليا. لأسباب تتعلق بالحفاظ على السيادة، فأنشأت الدولة الإندونيسية الهيئة التنفيذية التي لها الوظيفة والعمل في الحفاظ والإدارة عليها. فمن خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 12 العام 2010 أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لإدارة المناطق الحدودية تحت إشراف ستة عشر وزيرا وثلاثة وزارة التنسيق. وقد وكلت الحكومة المحلية من خلال نظام وزير الداخلية رقم 2 العام 2011، بتكوين هيئة التنفيذ لمناطق الحدودية. وقد أنشأت جزر رياو الهيئة تحت إشراف أربع مديرية (بتان وكريمون وناتونا وأنامباس) و مدينة باتام لأنهم بجوار الحدود مع أربع دول وهي: ماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا. وهناك بعض الوكالات التي لها الوظيفة وحق التنفيذ في هذه القضية منها: جيش الدولية الإندونيسية والشرطة الإندونيسية الجمهورية ووكالة الأمن البحري لجمهورية إندونيسيا. ولكن لأسف شديد، مع كثرتها الوكالات التي ذو قدرة حق التنفيذ في إدارة الحدود لم يكن تعمل على النحو الأمثل. يجب أن تكون التعاون بين الوكالات نهج تعاوني قادرة على تحسين إدارة المناطق الحدودية. فبناء على نتيجة البحث الذي يتعلق بتنفيذ المناطق الحدودية في

جزر رياو على أن التعاون لم تعمل على النحو الأمثل ولم يكن التعاون تعاوناً جامعياً التي تمثل بوجود المواقف الانتهازية من كل طرف التي ذو قدرة حق التنفيذ في المناطق الحدودية.

**الكلمة المهمة: الحكومة التعاونية، المناطق الحدودية.**

## **AKRONIM**

BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
BAKORKAMLA	: Badan Koordinasi Kemanan Laut
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BPP	: Badan Pengelola Perbatasan
BPPD	: Badan Pengelola Perbatasan Daerah
BPPP	: Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan
CG	: Collaborative Governance
CTP	: Collaborative Team Process
CWA	: Cakupan Wilayah Administrasi
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPB	: Institut Pertanian Bogor
KEPRES	: Keputusan Presiden
KEPRI	: Kepulauan Riau
KKA	: Kabupaten Kepulauan Anambas
KKP	: Kementrian Kelautan dan Perikanan
KM	: Kilo Meter
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LOKPRI	: Lokasi Prioritas
MOU	: <i>Momorandum of Understanding</i> (MOU),
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden



PLS	: Partial Least Square
PNG	: Papua New Guinea
POLHUKAM	: Politik, Hukum dan Keamanan
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNA	: Social Networking Analysis
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UMRAH	: Universitas Maritim Raja Ali Haji
UMY	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
UPTD	Unit Pelayanan Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WKP	: Wilayah Konsentrasi Pengembangan

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
NOTA DINAS .....	vii
NOTA DINAS .....	viii
NOTA DINAS .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
AKRONIM .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR BAGAN .....	xxv
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
DAFTAR TABEL .....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	19
1.3. Tujuan Penelitian .....	19
1.4. Manfaat Penelitian .....	20
1.5. Tinjauan Pustaka .....	21
1.6. Sistematika Penulisan .....	43

1.7. Publikasi Ilmiah.....	45
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>46</b>
2.1. Konsep Dasar dan Definisi <i>Collaborative</i> .....	46
2.1.1. Karakteristik dan Prinsip Dasar <i>Collaborative</i> .....	52
2.1.2. Nilai Dasar <i>Collaborative</i> .....	55
2.1.3. Bentuk-bentuk <i>Collaborative</i> .....	57
2.1.4. Prinsip-Prinsip Dalam <i>Collaborative</i> .....	59
2.1.5. Alasan, Manfaat dan Tujuan <i>Collaborative</i> .....	62
2.1.6. Tahapan Dalam <i>Collaborative</i> .....	63
2.1.7. Tipe-tipe <i>Collaborative</i> .....	64
2.1.8. <i>Collaborative</i> Dalam Pandangan Islam .....	70
2.2. <i>Governance</i> .....	72
2.3. <i>Collaborative Governance</i> .....	75
2.3.1. Urgensi <i>Collaborative Governance</i> .....	79
2.3.2. Tahap Proses <i>Collaborative Governance</i> .....	80
2.3.3. Efektifitas Dalam <i>Collaborative Governance</i> .....	86
2.3.4. Hambatan <i>Collaborative Governance</i> .....	90
2.4. Perbatasan dan Kawasan Perbatasan.....	96
2.4.1. Garis Perbatasan dan Wilayah Perbatasan.....	101
2.4.2. Fungsi Perbatasan.....	102
2.4.3. Wilayah perbatasan.....	104
2.4.4. Kawasan Pebatasan.....	105
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>108</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	108

3.2.	Data Penelitian .....	112
3.2.1.	Jenis Data.....	112
3.2.2.	Data yang Diperlukan .....	112
3.2.3.	Sumber Data .....	113
3.2.4.	Informan .....	116
3.2.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	118
3.3.	Ruang Lingkup Penelitian .....	123
3.4.	Analisa Data Kualitatif.....	124
3.5.	Analisis Data Kuantitaif .....	126
3.5.1.	Social Networking Analysis .....	126
3.5.2.	Partial Least Square .....	130
3.6.	Urgensi Penelitian dan Keterbatasan Peneliti. ....	132
3.7.	Kerangka Berfikir.....	133
3.8.	Definisi Operasional.....	136
3.9.	Publikasi .....	142
<b>BAB IV</b>	<b>STAKE HOLDER DAN PROBLEMATIKA</b>	
	<b>PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI</b>	
	<b>KEPULAUAN RIAU.....</b>	<b>144</b>
4.1.	<i>Stakeholder</i> Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Kawasan	
	Perbatasan.....	144
4.1.1.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan.....	147
4.3.2.	Badan Kemanan Laut .....	156
4.3.3.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan	
	Riau.....	160

4.3.4. Badan Pengelola Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.	164
4.2. Permasalahan dan Tantangan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan.....	180
4.3. Isu-isu Kawasan Perbatasan .....	184
4.4. Sistem Keamanan Perbatasan.....	196
<b>BAB V ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KEPULAUAN RIAU.....</b>	<b>203</b>
5.1. Deskripsi Responden.....	203
5.2. Analisis Persepsi Terhadap Dimensi-dimensi <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Di Kepulauan Riau. ....	210
5.2.1. Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Culture</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau. ....	216
5.2.2. Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Leadership</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau. ....	217
5.2.3. Persepsi Terhadap Dimensi <i>Strategic Vision</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau. ....	219
5.2.4. Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Team Process</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau. ....	223



5.2.5. Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Structure</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau. ....	225
5.3. Analisis Model PLS <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.	227
5.4. Analisis Jejaring Sosial (SNA) <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. ....	240
5.4.1. Derajat Node dan Derajat Rata-rata ( <i>Average Degree</i> ). ....	244
5.4.2. <i>Centrality</i> . ....	246
5.4.3. <i>raph Density</i> .....	263
5.5. Analisis Hasil <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. ....	264
5.5.1. Analisis Proses Tahapan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan.....	264
5.5.2. Pengembangan <i>Collaborative Governance</i> Model Ansell dan Gash .....	271
5.6. Analisis Efektifitas <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan .....	273
5.6.1. Tipe <i>networked structure</i> .....	273
5.6.2. <i>Commitment to a common purpose</i> .....	275
5.6.3. <i>Trust among the participants</i> .....	277
5.6.4. <i>Governance</i> .....	280
5.6.5. <i>Access to Authority</i> .....	282

5.6.6. <i>Distributive accountability</i> .....	284
5.6.7. <i>Information sharing</i> .....	286
5.6.8. <i>Access to resources</i> .....	288
5.7. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan.....	290
5.7.1. Faktor pendukung .....	291
5.7.2. Faktor penghambat .....	294
5.8. Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau .....	306
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	321
6.1. Kesimpulan.....	321
6.2. Sumbangan Teoritik .....	324
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	327
Buku-buku dan Jurnal.....	327
Website .....	335
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	338
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	343
Lampiran 1 Angket Jejaring Sosial Pengelolaan Kawasan Perbatasan	343
Lampiran 2 Interview Guide.....	347
Lampiran 3 Angket Collaborative Governance dengan Model PLSM	350
Lampiran 4 Rekapitulasi Angket CG (PLSM) .....	366
Lampiran 5 Publikasi.....	374

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 2. 1 Collaborative Governance Model Ansell dan Gash .....</b>	<b>85</b>
<b>Bagan 3.1 Skema Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>111</b>
<b>Bagan 3. 2 Kerangka Berfikir Model Fish Bone .....</b>	<b>135</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Peta Perbatasan Indonesia	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kedaulatan NKRI .....	147
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2016.....	152
Gambar 4.3	Peta Garis Perbatasan NKRI.....	155
Gambar 4.4	Struktur Organisasi BAKAMLA .....	160
Gambar 4.5	Tampilan Website Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam .....	168
Gambar 4.6	Website Pemerintah Kabupaten Bintan .....	171
Gambar 4.7	Peta Pulau Terluar di Kabupaten Natuna.....	172
Gambar 4.8	Tampilan Website BPP Kabupaten Karimun .....	178
Gambar 5.1	Collaborative Governance dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 5.2	Pola CG Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau .....	244
Gambar 5.3	<i>Closeness Centrality</i> Diantara Node-Node.....	255
Gambar 5.4	Graph Lembaga Yang Menjadi <i>Bottleneck</i> .....	259
Gambar 5.5	Pengembangan CG Model Ansell dan Gash.....	272

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Tabulasi Kasus Illegal Fishing Yang Terjadi di Kepulauan Riau periode 2011-2015 .....	8
Tabel 1 2 Tabulasi Tinjauan Pustaka Berikut Perbedaan Penelitian ....	33
Tabel 3. 1 Formulasi Definisi Dasar Penelitian Dengan Pendekatan CATWOE	122
Tabel 3. 2 Interpretasi Koefisien Korelasi .....	131
Tabel 3. 3 Variabel Bebas.....	138
Tabel 4. 1 Jarak Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi Kepulauan Riau .....	163
Tabel 4. 2 Nama-nama Nama Instansi Pengelola Perbatasan di Kepulauan Riau dan Pulau-pulau Terluar di Masing-masing Kabupaten/Kota.....	164
Tabel 4. 3 Wewenang, Tugas dan Fungsi BNPP dan BPPD .....	192
Tabel 5. 1 Deskripsi Responden.....	204
Tabel 5. 2 Kodifikasi Lembaga, Kedudukan dan Institusi Pengelola Perbatasan di Tingkat Pusat .....	211
Tabel 5. 3 Kodifikasi Lembaga, Kedudukan dan Institusi Pengelola Kawasan Perbatasan di daerah .....	213
Tabel 5. 4 Kodifikasi Lembaga Negara Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan .....	215
Tabel 5. 5 Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Culture</i> .....	216
Tabel 5. 6 Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Leadership</i> .....	218

Tabel 5. 7 Persepsi Terhadap Dimensi <i>Strategic Vision</i> .....	222
Tabel 5. 8 Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Team Process</i> .....	224
Tabel 5. 9 Persepsi Terhadap Dimensi <i>Collaborative Structure</i> .....	226
Tabel 5. 10 Hasil <i>Descriminant Validity</i> .....	231
Tabel 5. 11 Hasil Outer Loading .....	233
Tabel 5. 12 Hasil AVE ( <i>Average Variances Extracted</i> ).....	234
Tabel 5. 13 Hasil <i>Composite Reliability</i> .....	234
Tabel 5. 14 Interpretasi Koefisien Korelasi.....	237
Tabel 5. 15 Variabel CG dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Kepulauan Riau .....	238
Tabel 5. 16 Degree Centrality Pengelolaan Kawasan Perbatasan .....	248
Tabel 5. 17 <i>Closeness Centrality</i> Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau .....	253
Tabel 5. 18 <i>Betweenes Centrality</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau .....	262
Tabel 5. 19 Matrik Hasil Penelitian <i>CG</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kepulauan Riau .....	302